

## PENYUSUNAN SCENARIO PLANNING TERKAIT PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA (IKN)

Alinda Dewi Trisnawati<sup>1</sup> Reza Apriani<sup>2</sup> Ida Yatun Palakyah<sup>3</sup> Muhammad Aprian Jailani<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Mataram

Alamat Korespondensi : [alindatrisnawati25@gmail.com](mailto:alindatrisnawati25@gmail.com), [Rezaapriani2018@gmail.com](mailto:Rezaapriani2018@gmail.com),  
[ldayatun40303@gmail.com](mailto:ldayatun40303@gmail.com), [aprianjaelani@ummat.ac.id](mailto:aprianjaelani@ummat.ac.id)

**Abstract:** *The capital city of the Republic of Indonesia (IKN) is currently played by the province of DKI Jakarta. Jakarta is not only the capital city of Indonesia, which in this case functions as the administrative center of government agencies with various locations and functions, but also as a multi-purpose trade and business center. Apart from that, many domestic and international economic activities take place in Jakarta related to the potential and vulnerability of the Jakarta city's environment, such as floods, landslides, sea water erosion, very severe river pollution, and traffic jams. Based on these problems, the relocation of the national capital (IKN) must be prepared carefully. This research aims to determine the government's scenario planning for moving the country's capital. The method used in writing this article uses the library research method or what is usually called library research. The results of this research show that the preparation of scenario planning related to moving the country's capital is seen from many aspects, namely sociological, geographical, geopolitical and economic aspects as well as the strategies used in the process of moving the country's capital. It is hoped that it can contribute to improving governance and collaborative procedures between society and government.*

**Keywords:** *Moving the country's capital, scenario planning, strategy*

**Abstrak :** *Ibu Kota Negara Republik Indonesia (IKN) saat ini diperankan oleh provinsi DKI Jakarta. Jakarta bukan hanya sebagai ibu kota negara Indonesia yang dalam hal ini berfungsi sebagai pusat administrasi instansi pemerintah dengan berbagai lokasi dan fungsi, namun juga sebagai pusat perdagangan dan bisnis yang serba guna. Selain itu banyak kegiatan perekonomian domestic dan internasional berlangsung di Jakarta terkait potensi dan kerentanan lingkungan hidup kota Jakarta, seperti banjir, tanah longsor, erosi air laut, pencemaran sungai yang sangat parah, dan kemacetan lalu lintas. Berdasarkan persoalan tersebut maka pemindahan ibu kota negara (IKN) harus dipersiapkan secara matang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyusunan scenario planning pemerintah dalam pemindahan ibu kota negara. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan atau biasa disebut dengan studi literatur (library research). Hasil dari penelitian ini bahwa penyusunan scenario planning terkait pemindahan ibu kota negara dilihat dari banyak aspek, yaitu aspek sosiologis, geografis, geopolitik dan ekonomi serta strategi yang diuganakan dalam proses*

*pemindahan ibu kota negara diharapkan dapat memberikan kontribusi terkait perbaikan tata kelola pemerintahan dan prosedur kolaboratif antara masyarakat dan pemerintah*

**Kata Kunci :** *Pemindahan ibu kota negara, scenario planning, strategi*

## **Pendahuluan**

Ditetapkannya Jakarta sebagai ibu kota mempunyai sejarah yang panjang, Jakarta yang pada masa pemerintahan Hindia-Belanda disebut dengan nama Batavia yang digunakan sebagai pusat administrasi atau pemerintahan yang sekaligus pusat perdagangan, sehingga pada saat itu terdapat berbagai fasilitas perkotaan yang menunjang aktivitas administrasi atau pemerintahan dan ekonomi pemerintah yang sudah berkembang dengan baik (Husin, 2016). Pasca kemerdekaan Indonesia, ibu kota Jakarta memiliki peran penting yang dimana Jakarta dalam proses kemerdekaan Indonesia, serta banyaknya tempat penting pemerintahan Hindia Belanda yang berpusat di Jakarta, hal ini dapat memfasilitasi peralihan kekuasaan setelah kemerdekaan. Meskipun pada awal kemerdekaan ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta berdasarkan kondisi politik dan keamanan saat itu, namun kedudukan ibu kota dikembalikan ke Jakarta hingga saat ini (Sabandar, 2016).

Ibu Kota Negara Republik Indonesia (IKN) saat ini diperankan oleh provinsi DKI Jakarta. Jakarta bukan hanya sebagai ibu kota negara Indonesia yang dalam hal ini berfungsi sebagai pusat administrasi instansi pemerintah dengan berbagai lokasi dan fungsi, namun juga sebagai pusat perdagangan dan bisnis yang serba guna. Selain itu banyak kegiatan perekonomian domestic dan internasional berlangsung di Jakarta (Herdiana, 2022). Dwifungsi ini menyebabkan peningkatan terus-menerus dalam jumlah pendudukan sementara dan penduduk tetap. Hal ini masih belum biasa diimbangi dengan kapasitas lingkungan dan perencanaan kota (Huynh, 2020). Pencemaran air sungai (Costa et al., 2016), urban heat island dan polusi udara (Syamsudin & Lestari, 2017), banjir (Asdak et al., 2018; Renald et al., 2016), merupakan beberapa permasalahan yang belum dapat diatasi dan belum adanya solusi oleh pemerintah.

DKI Jakarta merupakan kota yang terletak dipesisir, tempat terjadinya interaksi antara bentang lahan daratan dan lautan (Harris et al., 2019), DKI Jakarta juga berpotensi bahaya yang berkaitan dengan laut dan perubahan iklim (Firman et al., 2011; Goh, 2019; Nurhidayah & McIlgorm, 2019). Beratnya bangunan dan infrastruktur yang ditempatkan di atas kota, menyebabkan risiko penurunan permukaan tanah (Andreas et al., 2018; Chaussard et al., 2013; Park et al., 2016). Daerah yang berdekatan langsung dengan laut berpotensi menjadi wilayah terdampak banjir (Latief et al., 2018; Takagi et al., 2016). Risiko menjadi lebih besar jika terjadi salah satu fenomena perubahan iklim, yaitu kenaikan permukaan air laut (Firman et al., 2011). Permasalahan permasalahan tersebut menjadi salah satu alasan dialihkannya salah satu fungsi yang dikelola DKI Jakarta yaitu pusat pemerintahan (He & Silliman, 2019). Oleh karena itu dalam hal ini pemerintah perlu memerhatikan

dari segi aspek lokasi dan lingkungan yang tepat untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada.

Berdasarkan penjelasan diatas tentunya pemerintah sudah mempertimbangkan dengan sangat matang berbagai konsekuensi yang akan terjadi kedepannya oleh karenanya Presiden Joko Widodo menilai diperlukannya pusat pemerintahan baru di luar pulau Jawa yang terpisah dari pusat bisnis nasional dimana munculah wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai calon ibukota. (Ramadhan, 2019). Alasan pemindahan ibukota adalah karena kondisi Jakarta yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk berkembang menjadi ibu kota, baik dari segi ketersediaan lahan maupun keadaan sosialnya yang kurang optimal dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Jakarta hanya berorientasi menjadi pusat perekonomian nasional semata (Baqiroh, 2019; Iradat, 2019).

Diketahui Pemerintah berencana memindahkan ibu kota dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur. Pemerintah melalui Kementerian perencanaan pembangunan Nasional/BAPPENAS menjelaskan beberapa alasan terkait pemindahan lokasi ibu kota baru dan mengapa memilih wilayah di luar Pulau Jawa khususnya di wilayah Kalimantan Timur yaitu karena besarnya pertumbuhan urbanisasi di Pulau Jawa khususnya di wilayah penyangga Ibu Kota Jakarta seperti, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan kawasan Cianjur. Diperkirakan terdapat 32 juta orang tinggal di wilayah yang dikenal dengan sebagai Jabodetabek Purjur. Sedangkan alasan terakhir adalah terkait potensi dan kerentanan lingkungan hidup kota Jakarta, seperti banjir, tanah longsor, erosi air laut, pencemaran sungai yang sangat parah, dan kemacetan lalu lintas (Bappenas, 2019).

Oleh karena itu, diharapkan dengan merelokasi salah satu pusat operasi tersebut, jumlah penduduk DKI Jakarta dapat berkurang sehingga permasalahan dapat diselesaikan dengan lebih mudah. Di lain sisi, Republik Indonesia akan memindahkan misi IKN dari pusat utama (pusat ekonomi dan pemerintahan) ke ibu kota lain seperti Washington D.C Amerika Serikat, Canberra, Australia, dan Putrajaya, Malaysia (Mayer et al., 2016). Persoalan pemindahan IKN ini terluang kembali sejak zaman kolonial, dengan hal yang relatif sama yakni persoalan lingkungan hidup DKI Jakarta yang “kelebihan kapasitas”. Topik ini kembali ramai setelah Presiden Republik Indonesia terpilih (2019–2024), Ir. Joko Widodo mengumumkan lokasi baru IKN dalam pidato kenegaraannya pasca pelantikan (Agustus, 2019). Dilanjutkan dengan kompetisi gagasan rencana lokasi baru IKN, penentuan dewan penasihat, pemilihan konsultan eksternal, rekrutmen pegawai khusus relokasi IKN, dan dilibatkannya banyak investor.

Berdasarkan persoalan tersebut maka pemindahan ibu kota negara(IKN) harus dipersiapkan secara matang. Mengingat kebijakan pemindahan ibukota merupakan hal yang sangat serius dengan berbagai konsekuensinya, maka pemerintah pusat berkewajiban untuk memberikan perhatian yang juga serius terhadap berbagai dinamika pro-kontra yang terjadi di tengah masyarakat. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penyusunan

scenario planning ( Alat Formulasi strategi untuk menghadapi masa depan) pemerintah dalam pemindahan ibu kota negara. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terkait perbaikan tata kelola pemerintahan dan prosedur kolaboratif antara masyarakat dan pemerintah dalam proses-proses pemindahan IKN selanjutnya.

## Kerangka Teori

### Strategi Penyusunan *Scenario Planning*

Dalam penelitian ini, untuk menganalisis strategi penyusunan *scenario planning* terkait pemindahan ibu kota negara, penelitian menggunakan indikator model teori strategi yang dikemukakan oleh Liddle Hart, yaitu indikator: 1). *Ends* (tujuan) 2). *Means* (sarana), 3). *Ways* (cara). Indikator ini juga sejalan dengan pengertian strategi menurut Gen. US Army (Ret) Andrew J. Good Paster, “*Strategy covers what we should do (ends), how we should do it (ways), and what we should do it with (means)*”(Mintzberg, 1991).

Dari teori tersebut, esensi strategi merupakan proses pengambilan keputusan terhadap elemen-elemen utama dari suatu strategi, meliputi *Ends* (sasaran, *goals, objective, target*), *Ways* (cara bertindak, *course of actions, concept, methode*) dan *Means* (sarana, kekuatan, sumber daya, potensi). Selanjutnya di dalam merumuskan strategi, perlu dipertimbangkan untuk uji kelayakan strategi, yang meliputi; *Suitable* (sesuai dengan yang diharapkan), yaitu *Desirable effects (ends)*, sasaran yang ditentukan harus mampu menimbulkan rangsangan motivasi untuk dicapai ; *Feasible* (layak dilakukan), yaitu *Capable of being done (ways)*, konsep/cara-cara yang dirumuskan mampu untuk dilaksanakan dan *Acceptable* (masuk akal), yaitu *Reasonable cost (means)*, sarana/sumber daya dan peralatan lain yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan yang mencukupi.

## Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptip dengan pendekatan studi literatur atau studi kepustakaan. Penelitian kajian pustaka didapat dari berbagai literatur seperti buku referensi, artikel, hasil penelitian yang sesuai catatan, dan berbagai jurnal yang informasi-informasi dari literatur dikumpulkan yang sesuai dengan kegiatan penelitian (Milya and Asmendri, 2020). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan sumber-sumber dokumen literatur. Sumber studi literatur ini berupa artikel jurnal online, berita online, hal website, dokumen serta peraturan perundang-undangan pemerintah online dan buku-buku yang berhubungan dengan pemindahan ibu kota negara (IKN).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: data sekunder dan primer. Data sekunder merupakan data yang tidak dihasilkan atau dikumpulkan oleh peneliti, melainkan diperoleh dalam bentuk olahan. Data sekunder dalam penelitian ini berupa artikel dari website, internet, berita terkait dan beberapa literatur terkait. Data primer adalah Data yang berupa opini subjek, dan hasil pengujian (suharsimi,2010), pada penelitian ini menggunakan data dari peneliti terdahulu/hasil pengujian yakni pada sumber (Saputra et al., 2021) yang berfokus pada analisis strategi pemindahan ibu kota negara.

Penelitian ini menggunakan analisis data miles Hubermen yaitu data yang diproses dari reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penyimpulan. Data yang telah dikumpulkan tersebut dipilah pilah dan divalidasi menggunakan pendekatan triangulasi. Pendekatan triangulasi Menurut Sugiyono (2015:83) triangulasi data merupakan Teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada.

**Hasil dan Pembahasan**

**Penyusunan scenario planning terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)**

Seperti yang kita ketahui scenario planning adalah cara untuk menegaskan kendali atas dunia yang tidak pasti dengan mengidentifikasi asumsi tentang masa depan dan menentukan bagaimana bisnis Anda akan merespons. Dengan membangun kesadaran organisasi tentang apa yang dapat terjadi, para pemimpin dapat melihat tanda-tanda peringatan akan munculnya tantangan dan merespons dengan tepat. Scenario planning sangat beragam digunakan disemua bidang, seperti perencanaan keamanan suatu negara, jika dilihat dalam dunia bisnis seperti perencanaan perdagangan dan lain sebagainya. Dalam hal ini scenario planning yang dikaji oleh peneliti adalah penyusunan scenario planning terkait pemindahan ibu kota Negara (IKN) menuju Kalimantan Timur.

Tujuan dari scenario planning ini adalah Ketika kejadian terburuk muncul, dokumen scenario planning memberikan nilai yang luar biasa dengan memainkan berbagai hasil dan mencantumkan langkah-langkah segera untuk mengatasi kerugian. Scenario planning, pada akhirnya, perencanaan dengan banyak kemungkinan akhir. Menyusun narasi membutuhkan seperangkat asumsi yang jelas tentang realitas hasil yang akan terjadi.

Perencana pemindahan ibu kota negara tentunya sudah di kaji lebih dalam oleh pemerintah, artinya pemerintah sudah bisa melihat bagaimana dampak kedepannya terkait kebijakan yang dikeluarkan. Proses pemindahan ibu kota Negara oleh pemerintah dilihat dari banyak aspek sangat memungkinkan untuk ditindak lanjuti. Melihat banyaknya permasalahan yang terjadi di ibu kota lama. Penyusunan scenario planning pemindahan IKN sudah ditinjau dari segi aspek, faktor pendorong dan penghambat pemindahan ibu kota yang semuanya sudah mempunyai scenario planning yang baik terhadap kemungkinan yang terjadi dimasa depan. Sumber: BPS DKI Jakarta

Kab/Kota	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta (Jiwa)		
	2020	2021	2022
Kep Seribu	27 749	28 240	28 925
Jakarta Pusat	1 056 896	1 066 460	1 079 995
Jakarta Utara	1 778 981	1 784 753	1 793 550
Jakarta Selatan	2 226 812	2 233 855	2 244 623
Jakarta Barat	2 434 511	2 440 073	2 448 975
Jakarta Timur	3 037 139	3 056 300	3 083 883
DKI Jakarta	10 562 088	10 609 681	10 679 951

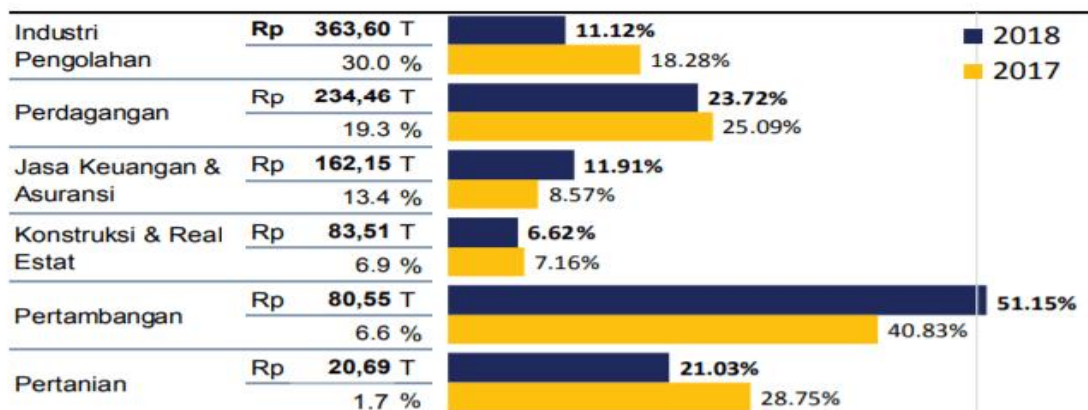
Sumber : 2020; Hasil SP2020; 2021-2022; Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (pertengahan tahun/Juni)

(<https://jakarta.bps.go.id/indicator/12/1270/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta.html> diakses 06 desember 2023

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	2020	2021	2022
Sukamara	63 464	64 941	66 845
Lamandau	97 611	100 535	104 387
Murung Raya	111 527	112 445	113 483
Barito Timur	113 229	114 243	115 406
Barito Selatan	131 140	131 606	131 997
Pulang Pisau	134 499	135 336	136 221
Gunung Mas	135 373	138 407	142 309
Barito Utara	154 812	157 231	160 235
Katingan	162 222	163 099	163 989
Seruyan	162 906	164 378	166 072
Kotawaringin Barat	270 388	272 531	274 935
Palangka Raya	293 457	298 954	305 907
Kapuas	410 446	416 181	423 210
Kotawaringin Timur	428 895	432 283	436 079
Kalimantan Tengah	2 669 969	2 702 170	2 741 075

Sumber: BPS Kalteng (<https://kalteng.bps.go.id/indicator/12/390/1/jumlah-penduduk.html> diakses 06 desember 2023

Berdasarkan data di atas, potensi pengembangan wilayah metropolitan di masa depan dapat dianalisis lebih lanjut. Jika kepadatan penduduk tidak terlalu padat di tingkat nasional, maka tidak akan ada hambatan besar dalam pembangunan. Hal ini tentunya merupakan hal yang baik karena jika infrastruktur dipersiapkan dengan baik, perekonomian dapat berjalan lebih lancar dan dinamis. Namun kepadatan penduduk yang relatif rendah menunjukkan perlunya insentif bagi penduduk atau UMKM untuk membuka perekonomian Kalteng. Karena tanpa pangsa pasar, perekonomian tidak dapat berfungsi.



Sumber : “APBN kita kinerja dan fakta”, edisi Januari 2019, Kementerian Keuangan (<https://bem.feb.ugm.ac.id/paradigma-pemindahan-ibu-kota-negara/> diakses 06 desember 2023)

Dari data di atas terlihat bahwa sektor pertambangan memberikan kontribusi terbesar terhadap APBN nasional pada tahun 2018. Hal ini memberikan alasan untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan dan mendekatkannya pada pusat penyumbang perekonomian nasional. Pemindahan ibu kota akan memberikan pembangunan infrastruktur yang lebih besar dan memaksimalkan potensi pengembangan akses tambang. Namun, jika dinamisme perekonomian hanya terpusat pada sektor pertambangan, maka ketergantungan perekonomian terhadap sektor pertambangan akan berkurang. Ketergantungan ekonomi pada sektor pertambangan dapat menimbulkan dampak negatif jangka panjang terhadap perekonomian, terutama jika sumber daya mineral semakin menipis. Ketergantungan pada sektor pertambangan juga tidak menjamin dinamisme perekonomian di sektor lain.

Dari hasil telaah literatur di atas dan analisis penulis, berikut ini adalah rekomendasi terkait aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pemindahan ibukota Negara(Purnama & Chotib, 2023) :

#### **Aspek Sosiologis**

Rencana pemindahan IKN otomatis mengikuti perpindahan manusia . Masyarakat baru berinteraksi dengan lingkungan baru sehingga timbul tantangan social. Komoditas imigran menjadi minoritas. Namun sedikit demi sedikit kegiatan di kantor IKN dapat dikelola. Oleh karena itu diperlukan upaya mitigasi sebelum permasalahan social muncul Sebagaimana yang dikemukakan oleh Max Weber bahwa menurutnya sosiologi berlaku sebagai studi untuk meninjau tindakan social guna menjelaskan hubungan sebab akibat dan dampak yang akan terjadi dari fenomena social tertentu. Adapun Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani aspek sosiologis ini t antara lain memberdayakan masyarakat asli, mengintegrasikan masyarakat asli dengan pendatang dan meningkatkan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan. Salah satu kunci untuk mencapai hal ini adalah dengan memenuhi kebutuhan ekonomi, termasuk penggunaan bahan baku lokal yang ramah lingkungan memperkuat ekonomi masyarakat asli yang didominasi komunitas masyarakat miskin, dan memperkuat institusi social seperti forum lintas agama.

Berdasarkan data BPS tahun 2015 yang berjudul Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045, Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan memiliki jumlah penduduk sebesar 3,5 juta jiwa pada tahun 2019. Secara spesifik , jumlah penduduknya terdiri dari 1,8 juta jiwa laki-laki dan 1,7 juta jiwa perempuan. Hingga tahun 2045, jumlah penduduk Kalimantan Timur diproyeksikan tumbuh rata-rata sebesar 4,41 persen setiap lima tahun.. Pada 2020, jumlah penduduk Kalimantan Timur diperkirakan akan meningkat menjadi 3,6 juta jiwa dengan 1,9 juta jiwa adalah laki-laki dan 1,7 juta jiwa adalah perempuan. Lima tahun kemudian angka tersebut tumbuh sebesar 5,86 persen menjadi 3,9 juta jiwa termasuk 1,9 juta laki-laki dan 1,8



perempuan. Pada tahun 2030 jumlah penduduknya penduduk laki-laki akan meningkat sebesar 5,02 persen menjadi 4 juta jiwa. Pada tahun 2045 jumlah penduduk Kalimantan Timur diproyeksikan meningkat sebesar 5,8 persen dibandingkan lima tahun sebelumnya. Lebih spesifiknya, hanya ada 3,8 ribu laki-laki dan perempuan yang memiliki selisih, 2,25 juta laki-laki dan 2,24 juta perempuan.

Melihat penjelasan di atas itu sebabnya Kalimantan Timur tercatat sebagai provinsi yang hampir tidak pernah terjadi konflik sosial besar, padahal sebenarnya masyarakat Kalimantan Timur sangat heterogen. Menurut komposisi penduduknya sebagian adalah pendatang dari wilayah tersebut provinsi Kalimantan Timur relative aman dari permasalahan konflik social, etnik, agama, ras dan antargolongan (SARA). Berdasarkan data Statistik K 2018 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS, 2018), Kalimantan Timur merupakan salah satu dari sepuluh provinsi dengan tingkat konflik massal yang rendah pada tahun 2017. Persentase konflik massal di desa atau kelurahan di Kalimantan timur adalah sebesar 1,64 persen atau peringkat terendah ke 10 di Indonesia. Jumlah konflik massal yang terjadi di Kalimantan timur sebanyak 17 kasus. Namun jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Kalimantan, konflik massal di Kaltim masih lebih tinggi. Jika dilihat dari penjelasan di atas maka sangat memungkinkan pemindahan ibu kota negara.

#### **Aspek Geografis**

Menurut Ferdinand Von Richthofen dalam Suhariyono dan Moch. Amien (1994:13) geografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang sifat permukaan bumi dan penduduknya serta gejala-gejala dan sifat yang ditimbulkan. Berdasarkan hal tersebut penting untuk dikaji lebih lanjut terkait pemindahan ibu kota terlebih dalam aspek geografis dampaknya terhadap lingkungan. Oleh sebab itu pemindahan ibu kota mempertimbangkan beberapa alasan utama sebagaimana yang dikemukakan Presiden Joko Widodo dipilihnya Kalimantan sebagai IKN, yaitu: (kominfo, go.id, 2019). pertama sangat risiko terjadi bencana alam yang minimal, baik banjir, tsunami, kebakaran hutan, gunung merapi maupun tanah longsor, kedua dilihat dari segi lokasi yang strategis dan berada di tengah-tengah Indonesia. Ketiga Lokasi yang berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang seperti Balikpapan dan Samarinda. Keempat Infrastruktur yang memadai dan terakhir tersedia lahan yang dikuasai pemerintah 180 ribu hektar.

Jika dilihat lebih lanjut, beberapa alasan yang dikemukakan di atas lebih spesifik mengarah pada alasan geografis. Tentunya hal tersebut tidak serta merta dapat dijadikan sebagai alasan utama dalam penunjukan IKN. Hal ini karena Kalimantan Timur merupakan provinsi yang memiliki potensi banjir yang tinggi. Selama ini sekitar 60,34 persen potensi banjir terjadi di provinsi Kalimantan Timur. Belum lagi potensi dari gempa dan tsunami yang disebabkan longsor bawah laut, dimana terdapat tiga titik sesar yakni Sesar Maratua, Sesar Mangkalihat, dan Sesar Paternostes (Kompas.com, 2019). Oleh karena itu, paling tidak diperlukan adanya perbandingan dari beberapa opsi daerah terkait aspek geografis yang dijadikan penilaian dalam penunjukan IKN.

Oleh karenanya pembangunan IKN harus memperhatikan karakteristik wilayah baik secara ekologi, geologi maupun social, sehingga dapat meminimalis risiko dan dampak dari sisi lingkungan hidup. Selain itu pembangunan di kawasan ini



harus memprioritaskan kaidah konservasi yaitu bagaimana konsep pembangunan itu harus memperhatikan lingkungan didalamnya.

### **Aspek Geopolitik**

Menurut Andersen dalam buku *Geopolitics, Geography and Strategy*, perbatasan internasional berpotensi menjadi ajang bentrokan militer antar negara, yang biasanya berkaitan dengan sengketa wilayah. Letak IKN baru juga sama dengan jalur laut kepulauan Indonesia yaitu Selat Sunda-Laut Jawa-Selat Karimatan Laut Natuna dan Laut China Selatan. Perpindahan IKN menuju Kalimantan Timur memerlukan perhatian aparat keagamaan negara. Peralihan perlu ibu kota baru yang akan dibangun di Kalimantan harus siap menghadapi tantangan eksternal dan internal, apalagi letaknya yang lebih dekat dengan Malaysia, Filipina dan negara-negara lain, terlihat bahwa hal ini dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya konflik dikemudian hari (referensi). Dipindahkannya IKN ke Kalimantan secara wilayah menyebabkan dibukanya IKN yang baru akan lebih terbuka. Oleh karena itu, ancaman eksternal akan semakin besar apabila aspek pertahanan dan keamanan tidak dipertahankan. Keberadaan ibu kota baru benar-benar terjamin jika dilengkapi infrastruktur keamanan dan pertahanan yang cukup memadai. Sementara yang kita ketahui sekarang masih belum cukup memadai.

Jika ditinjau dari segi geografis, geopolitik, lokasi ibu kota baru itu berada di tengah dan terbuka oleh karenanya mudah diakses oleh pasukan asing jika ingin melancarkan serangan dari segala dimensi baik dari darat, laut, dan udara. Selain rentan terhadap ancaman darat, lokasi ibu kota baru juga rentan terhadap serangan dan serbuan pasukan dari wilayah laut. Pemilihan tempat yang akan dijadikan ibu kota harus didasarkan pada pertimbangan geografis dari sudut pandang dan keamanan daerah walaupun letak lokasi IKN antara Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan bahwa secara horizontal letak calon IKN baru berada ditengah-tengah kepulauan NKRI, namun tidak secara vertikal. Letak Kalimantan Timur tersebut terlalu dekat dengan garis batas internasional.

### **Aspek Ekonomi**

Menurut Kasmir dan Jakfar (2012), kejelasan aspek ekonomi kita dapat melihatnya dari seberapa besar dampak proyek/rencana itu akan ditindaklanjuti. Dampak ini terutama berdampak pada perekonomian secara umum terhadap masyarakat secara keseluruhan. Selain itu para ahli juga menekankan pentingnya penelitian mendalam terhadap proses manajemen ketika mengembangkan IKN baru. Pengamat perkotaan juga menilai pembangunan infrastruktur yang dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek ekonomi akan sangat merugikan. Ia berpesan agar perencanaan kawasan baru IKN harus mempertimbangkan masyarakat yang berada di kota-kota di sekitarnya sehingga bertentangan dengan perkembangan ibu kota jangka panjang. Aksesibilitas yang mudah dan cepat menuju ibu kota memperlambat perkembangan kawasan IKN baru karena keterbatasan fasilitas dan pelayanan (kpbu.kemenkeu.go.id, 2022).

Dari sisi ekonomi rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur pemerintah secara bertahap perlu mempertimbangkan kondisi perekonomian

Kalimantan timur dan tantangan dinamika global pada saat perumusan peraturan dan pembangunan dan relokasi IKN, serta pengimplementasinya secara berahap. Mengingat dibutuhkan pendanaan/pembiayaan cukup besar yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh tahapan kerja pembangunan IKN. Namun berdasarkan dampak positif dari pengembangan dan peralihan IKN, besar kecilnya pembiayaan yang diperlukan menjadi tidak signifikan jika diukur dengan pengorbanan yang harus dilakukan.

Berdasarkan berbagai aspek yang dijelaskan diatas maka pemerintah perlu mempertimbangkan keempat aspek tersebut secara seimbang, sehingga pemerintah dapat merancang dan melaksanakan pemindahan ibu kota negara dengan meminimalkan resiko dan mengoptimalkan manfaatnya. Selain itu perlu pelibatan semua pemangku kepentingan dan melibatkan berbagai pihak di pusat maupun di daerah dan dukungan berupa legitimasi formal untuk menentukan pilihan terbaik dalam pemindahan ibu kota negara.

### **Strategi penyusunan scannario planning terkait Pemindahan Ibu Kota Negara**

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan indikator model teori strategi yang dikemukakan oleh Little Hart, yaitu indikator: 1). *Ends* (tujuan) 2). *Means* (sarana), 3). *Ways* (cara). Indikator ini juga sejalan dengan pengertian strategi menurut Gen. US Army (Ret) Andrew J. Good Paster, “*Strategy covers what we should do (ends), how we should do it (ways), and what we should do it with (means)*”(Mintzberg, 1991).

Dari teori tersebut, esensi strategi merupakan proses pengambilan keputusan terhadap elemen-elemen utama dari suatu strategi, meliputi *Ends* (sasaran, *goals, objective, target*), *Ways* (cara bertindak, *course of actions, concept, methode*) dan *Means* (sarana, kekuatan, sumber daya, potensi).

### **Ends (Tujuan) Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Baru Di Kalimantan Timur**

Tujuan dari pengelolaan bangsa Indonesia di masa depan, yakni pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, peningkatan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan, dan lahirnya wajah Indonesia yang bisa dibanggakan. Dengan kata lain, pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur adalah sebuah aksi strategis yang besar diantara beberapa aksi strategis lainnya yang diperlukan untuk mewujudkan paradigma baru pembangunan yang selama ini hanya hadir sebagai wacana yang menggantung, karena ia memiliki perkiraan efek jangka panjang yang jelas dan berkelanjutan. Tujuan tersebut sesuai dengan kepentingan nasional dan tujuan ekonomi pertahanan yang berlandaskan pada dasar pertimbangan yang tepat untuk dapat mendukung tujuan kesejahteraan umum dan keamanan negara.

### **Means (Sarana Yang Dimiliki Untuk Mendukung Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara)**

ketersediaan lahan yang cukup luas untuk pembangunan infrastruktur pemerintah serta lokasi calon ibu kota yang dekat dengan kota existing menjadi sumber daya dan dukungan sendiri dalam upaya pemindahan IKN. Dari aspek pertahanan dan keamanan, Kalimantan Timur memiliki akses serta dukungan darat,

laut, dan udara yang cukup baik. Semua kementerian/lembaga dilibatkan dalam proses upaya pemindahan ibu kota negara, termasuk Kementerian ESDM dan Kementerian KLHK, sehingga dapat mendukung tujuan Indonesia dalam upaya pemindahan ibu kota negara.

**Ways (Cara Atau Langkah Yang Dilakukan Untuk Pemindahan Ibu Kota Negara)**

Ways merupakan sebuah proses yang digunakan untuk merumuskan cara-cara yang akan ditempuh dalam merencanakan strategi. Ways dilaksanakan dengan menentukan cara yang akan digunakan untuk bertindak, membuat sebuah konsep, dan menentukan metode yang akan digunakan dalam proses pencapaian tujuan. Dalam memindahkan ibu kota negara, tentu dibutuhkan konsep yang matang dan sesuai dengan karakteristik wilayah dan juga masyarakatnya. Ada banyak strategi dan juga lesson learned dari negara lain yang dapat dijadikan acuan ataupun suatu paket strategi dalam upaya pemindahan ibu kota negara. .

Secara umum, Analisis Strategi dalam upaya pemindahan ibu kota negara ini dirangkum dalam bagan berikut:



Sumber: Diolah Peneliti (2023)

Penyusunan scenario planning pemindahan IKN sudah ditinjau dari segi aspek, faktor pendorong dan penghambat pemindahan ibu kota yang semuanya sudah mempunyai scenario planning yang baik terhadap kemungkinan yang terjadi dimasa depan Berdasarkan data di atas, potensi pengembangan wilayah metropolitan di masa depan dapat dianalisis lebih lanjut. Hal ini tentunya merupakan hal yang baik karena jika infrastruktur dipersiapkan dengan baik, perekonomian dapat berjalan lebih lancar dan dinamis.

**KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

## Kesimpulan

Perencanaan pemindahan ibukota khususnya keluar dari pulau Jawa terus dikaji oleh pemerintah selama bertahun-tahun dengan mempertimbangkan segala bentuk konsekuensi dan kemungkinan yang akan terjadi sebelum menentukan keputusan besar untuk memindahkan ibukota keluar Jakarta atau tetap menempatkan Jakarta sebagai ibukota negara. Melihat pengalaman dari berbagai negara menunjukkan bahwa pemindahan ibukota tidak semata didorong oleh pertimbangan kondisi ibu kota lama yang sudah terlalu padat dan kurang tersedianya infrastruktur dan fasilitas perkotaan di tempat baru. Pertimbangan politik dan sosial-ekonomi-ekologi juga harus menjadi faktor penting dalam keputusan pemindahan ibu kota negara. Adapun strategi langkah yang dilakukan pemerintah terkait pemindahan ibu kota yaitu dengan perancangan pembuatan RUU tentang ibu kota, pembentukan badan otorita, membuat kerangka kerja, dan mengoptimalkan ancaman dan hambatan pemindahan ibu kota. Oleh sebab itu diperlukannya studi yang mendalam untuk melibatkan berbagai pihak di pusat maupun di daerah dan dukungan berupa legitimasi formal sangat diperlukan untuk menentukan pilihan terbaik dari semua skenario pemindahan ibukota negara. Keputusan pemindahan ibukota negara akan menjadi proyek publik terbesar dan terpenting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Penting untuk dipahami semua pihak, faktor penghambat dan pendorong dalam kebijakan pembangunan dan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Pemindahan IKN sebagai potensi ekonomi yang besar harus tetap mempertimbangkan aspek sosiologis, aspek geografis, aspek ekonomi dan aspek geopolitik. Oleh karena itu harus didukung semua pihak agar dapat berjalan efektif.

## Rekomendasi

Rekomendasi dan saran penyusunan scenario planning terkait pemindahan ibu kota negara sesuai dengan konsep ibu kota negara ideal adalah (1) diperlukan komitmen dan kerja keras semua pihak dalam upaya pemindahan ibu kota negara, terutama untuk meluruskan tujuan pemindahan ibu kota negara. memindahkan ibu kota negara atas dasar kepentingan nasional. . Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kembali urgensi pemindahan ibu kota negara dalam jangka panjang, apa dampak dan manfaatnya, apalagi dalam situasi dan kondisi seperti saat ini dimana Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan seperti pandemi dan bencana alam. Jangan sampai pemindahan ibu kota negara hanya menjadi mega proyek tentunya untuk kepentingan politik dan elite, (2) diperlukan sinergi antar instansi terkait, serta melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat Kalimantan Timur dalam mencari alternatif fasilitas dan sumber daya pendukung lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung relokasi tersebut. modal negara tanpa membawa dampak negatif dan potensi konflik di wilayah Kalimantan Timur.

Selain itu, rekomendasi kepada Kementerian dan DPR agar mengedepankan undang-undang tentang pemindahan ibu kota negara sebagai agenda prolegnas untuk mengatasi kekosongan hukum dan mempercepat upaya pemindahan IKN. Mengingat peran ibu kota negara di masa depan Indonesia, kehadiran undang-undang dapat menjadi landasan percepatan pemindahan ibu kota negara. (3) ke

depan perlu dilakukan pendalaman dan finalisasi beberapa kebijakan mengenai pembentukan badan otoritas, pembuatan kerangka khusus berupa cetak biru pengalihan IKN, pembuatan konsep atau desain strategis pengalihan IKN. IKN serta mengoptimalkan potensi ekonomi dan pertahanan dalam meminimalisir ancaman dan hambatan pengalihan IKN. Kementerian Pertahanan juga membutuhkannya. mempertimbangkan adanya tim khusus kajian pertahanan untuk menghadapi ancaman baik militer maupun non militer dalam upaya pemindahan ibu kota negara. Terakhir, bagi para akademisi atau peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai strategi pemindahan ibu kota negara, khususnya dalam peningkatan sektor ekonomi dan pertahanan.

### Daftar Pustaka

- Andreas, H., Zainal Abidin, H., Pradipta, D., Anggreni Sarsito, Di., & Gumilar, I. (2018). Insight look the subsidence impact to infrastructures in Jakarta and Semarang area; Key for adaptation and mitigation. MATEC Web of Conferences, 147(June 2007), 08001
- Asdak, C., Supian, S., & Subiyanto. (2018). Watershed management strategies for flood mitigation: A case study of Jakarta's flooding. Weather and Climate Extremes, 21, 117–122
- Bappenas. 2019. "Kajian Konsolidasi: Penentuan Lokasi Pemindahan Ibu Kota Negara." Dokumen tidak diterbitkan
- Baqiroh, N. F. A. B. (2019, Mei 3). Wacana Pemindahan Ibukota: Jakarta Tetap jadi Pusat Bisnis. Kabar24 <https://kabar24.bisnis.com/read/20190503/15/918474/wacana-pemindahan-ibukota-jakarta-tetap-jadi-pusat-bisnis>
- Costa, D., Burlando, P., & Priadi, C. (2016). The importance of integrated solutions to flooding and water quality problems in the tropical megacity of Jakarta. Sustainable Cities and Society, 20, 199–209.
- Firman, T., Surbakti, I. M., Idroes, I. C., & Simarmata, H. A. (2011). Potential climate-change related vulnerabilities in Jakarta: Challenges and current status. Habitat International, 35 (2), 372–378
- Harris, L. R., Bessinger, M., Dayaram, A., ... Niekerk, L. Van. (2019). Advancing land-sea integration for ecologically meaningful coastal conservation and management. Biological Conservations, 237, 81–89
- Herdiana, D. (2022). Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan atukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik. Jurnal Transformative, 8(1), 1–30. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2022.008.01.1>
- He, Q., & Silliman, B. R. (2019). Climate Change, Human Impacts, and Coastal Ecosystems in the Anthropocene. Current Biology, 29 (19), R1021–R1035.
- Husin, H. (2016). Ujung Senja Pabrik-Pabrik Gula di Batavia Awal Abad ke-18. Sosio E-Kons, 8(2).

- Huynh, D. (2020). In Making Mega Cities in Asia, 49–69.
- Latief, H., Putri, M. R., Hanifah, F., Afifah, I. N., Fadli, M., & Ismoyo, D. O. (2018). Coastal Hazard Assessment in Northern part of Jakarta. *Procedia Engineering*, 212, 1279–1286
- Mayer, H., Sager, F., Kaufmann, D., & Warland, M. (2016). Capital city dynamics: Linking regional innovation systems, locational policies and policy regimes. *Cities*, 51, 11–20
- Purnama, S. J., & Chotib, C. (2023). Analisis kebijakan publik pemindahan ibu kota negara. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 13(2), 153–166.
- Ramadhan. (2019, April 30). Rencana Pinah Ibu Kota: Dari Era Soekarno Hingga Jokowi. *Asumsi*. <https://www.asumsi.co/post/rencana-pindah-ibu-kota-dari-erasoekarno-hingga-jokowi>
- Sabandar, S. (2016, Agustus 15). Cerita Dibalik Aksi Pindah Ibukota ke Jogja. *Liputan6*. <https://www.liputan6.com/regional/read/2577674/cerita-di-balik-aksi-pindahibu-kota-ke-jogja>.
- Syamsudin, F., & Lestari, S. (2017). Dampak Pemanasan Pulau Perkotaan (Urban Heat Island) Pada Peningkatan Tren Curah Hujan Ekstrem Dan Aerosol Di Megapolitan Jakarta Sejak Tahun 1986. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 18 (1), 54
- Takagi, H., Esteban, M., Mikami, T., & Fujii, D. (2016). Projection of coastal floods in 2050 Jakarta. *Urban Climate*, 17, 135– 145